

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN
TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb)**

Zulmi Asham*

Prof. H. M. Yamin Lubis, SH., M.S., C.N**

Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H***

ABSTRAK

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanaan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penyelundupan barang ilegal menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal menurut Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan serta Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam hasil penelitian tesis ini yaitu bahwa Pengaturan hukum tentang penyelundupan barang ilegal menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal dalam Kepabeanaan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dan Badan Hukum. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN. Stb yaitu unsur dari Pasal 102 UU dan 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelundupan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal. Proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim menurut Peneliti belum maksimal dengan aturan yang berlaku dan putusan ini terlalu ringan dibandingkan kerugian terhadap negara yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Kepabeanaan, Penyelundupan, Barang Ilegal.

**RESPONSIBILITY FOR CUSTOMS CRIMINAL ACTIONS AGAINST
PERFORMERS OF ILLEGAL GOODS SMUGGLING
(Study Decision Number 556/Pid.B/2019/PN.Stb)**

Zulmi Asham*

Prof. H. M. Yamin Lubis, SH., M.S., C.N**

Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H***

ABSTRACT

International trade has one very significant negative impact, namely violations of the provisions on the import and export of goods, or what we know better as the criminal act of smuggling. The perpetrators of criminal acts commit or attempt to carry out/import goods from or into Indonesian customs territory without heeding the provisions of the Law.

The problem in this thesis research is how the legal regulation regarding smuggling of illegal goods is according to positive law in Indonesia, what is the responsibility of perpetrators of the crime of smuggling illegal goods according to Law 17 of 2006 concerning Customs and what is the legal consideration of the panel of judges regarding decision Number 556/Pid.B /2019/PN Stb.

The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

The conclusion in the results of this thesis research is that legal regulations regarding the smuggling of illegal goods according to positive law in Indonesia are regulated in Article 102 of Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The responsibility of perpetrators of the crime of smuggling illegal goods in customs includes: the responsibility of individuals, customs and excise officials, goods transporters, customs service operators (PPJK) and legal entities. Legal Considerations of the Panel of Judges Regarding Decision Number 556/Pid.B/2019/PN. Stb, namely the elements of Article 102 of the Law and 2 (two) valid pieces of evidence have been fulfilled and the Defendants must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime of "Smuggling" as charged in the Single Indictment. According to the researcher, the decision-making process by the panel of judges was not optimal with the applicable regulations and this decision was too light compared to the losses to the state resulting from the defendant's actions.

Keywords : Liability, Crime, Customs, Smuggling, Illegal Goods.